

**UPAYA PEMERINTAH KOTA PEKANBARU MENINGKATKAN DAYA
SAING USAHA KECIL MENENGAH DALAM MENGHADAPI
MASYARAKAT EKONOMI ASEAN TAHUN 2016**

Oleh:

Muhammad Firdaus

Email: muhammadfirdaus@yahoo.com

Pembimbing: Afrizal S.IP MA

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Riau

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru, 28293

Abstract

This research describes the effort of government of Pekanbaru toward the competitions of micro and small bussiness in Asean Economic Community in 2016. Asean Economic Community are one of modells economic integrations to create a common market in Southeast Asia regions. Micro and small business are one of micro economic modells in Indonesia that have big potency for economic growth in Indonesia.

The research method used was a qualitative with descriptive as a technic of the research. Writer collects data from books, encyclopedia, journal, mass media and websites to analyze the effort of government of Pekanbaru toward the competitions of micro and small bussiness in Asean Economic Community. The theories applied in this research are neoliberalism perspective with the globalization theory by Robert W Cox.

The research shows that the effort of government of Pekanbaru toward the competitions of micro and small bussiness in Asean Economic Community are by controlling and supervised. Some steps are have done by government of Pekanbaru are doing socializations of Asean Economic Community, give a supervised, held a consultations bussiness and controlling by create a bureauxations for investations in Pekanabru city.

Key words: *asean, economic community, invest and micro small business.*

PENDAHULUAN

Penelitian ini merupakan sebuah kajian ekonomi politik internasional yang menganalisis mengenai upaya Pemerintah Kota Pekanbaru meningkatkan daya saing usaha kecil menengah dan industri kreatif dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN tahun 2016. Pasca terjadinya perang dingin dan keruntuhan rezim Uni Soviet secara dasar merubah peta politik dan isu keamanan dalam dunia internasional. Memasuki era tahun 1990, isu keamanan tidak lagi menjadi satu-satunya isu dalam politik internasional terdapat didalamnya isu ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan yang saat ini mewarnai isu dalam arena politik internasional.

Perkembangan yang paling signifikan dalam komunitas ASEAN adalah perkembangan masyarakat ekonomi ASEAN yang sudah mulai dilaksanakan sejak tahun 2015. Salah satu negara yang memegang peranan penting dalam perkembangan masyarakat ekonomi ASEAN adalah Indonesia yang merupakan salah satu negara pendiri ASEAN. Masyarakat Ekonomi ASEAN bagi Indonesia merupakan sebuah peluang dan tantangan yang jika dimanfaatkan dengan baik dapat meningkatkan perekonomian domestik sedangkan jika tidak dipersiapkan dengan baik, maka Masyarakat Ekonomi ASEAN bisa mengakibatkan Indonesia sebagai pangsa pasar internasional.

Salah satu wilayah di Indonesia yang akan merasakan dampak dari masyarakat ekonomi ASEAN adalah Kota Pekanbaru yang berada di Provinsi Riau yang lokasinya secara geografi berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.

Perkembangan perekonomian di Kota Pekanbaru saat ini didominasi oleh perdagangan jasa kuliner baik dari dalam ataupun dari luar negeri. Beberapa investasi kuliner atau *coffe shop* dari luar negeri sudah mulai masuk ke Kota Pekanbaru seperti Starbuck, KFC, MC Donald, Sushi Tei dan resto lainnya. Pertumbuhan investasi ini tentu saja berdampak pada persaingan terhadap usaha mikro dan kecil menengah di Kota Pekanbaru.

Hubungan Internasional merupakan studi tentang interaksi antara beberapa aktor yang berpartisipasi dalam politik internasional yang meliputi negara-negara, organisasi internasional, organisasi non-pemerintah, kesatuan sub-nasional seperti birokrasi dan pemerintah domestik serta individu-individu. Tujuan dasar studi Hubungan Internasional adalah mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku para aktor negara maupun non negara, di dalam arena transaksi internasional. Perilaku ini bisa berwujud kerjasama, pembentukan aliansi, perang, konflik serta interaksi dalam organisasi internasional.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan perspektif liberalisme,

dimana dalam perspektif ini yang menjadi tujuan utama dari hubungan perdagangan adalah efisiensi untuk mendapatkan keuntungan dari setiap transaksi dan interaksi ekonomi yang dijalankan. Perspektif ini bermanfaat untuk memahami fenomena disetiap negara atau pemerintah yang berusaha untuk meningkatkan daya saing nasional dan kekuatan ekonominya untuk mendapatkan keuntungan yang ditawarkan oleh pasar internasional atau global.¹ Menurut Mohtar Mas'ood secara umum ekonomi internasional adalah studi mengenai saling berhubungannya antara ekonomi dan politik dalam era internasional. Dalam definisi yang khusus, fokus perhatian ekonomi politik adalah hubungan antara dinamika pasar dengan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan pasar ditingkat domestik maupun internasional.²

Ekonomi internasional merupakan hubungan ekonomi antarnegara di dunia. Hubungan tersebut menimbulkan saling ketergantungan (*interdependence*) antara negara satu dengan negara lainnya dan merupakan esensi yang penting untuk peningkatan kesejahteraan hidup hampir semua negara di dunia, selain itu hubungan ini tidak hanya identik dengan hubungan ekonomi internasional antarnegara namun sebagian besar

berhubungan dengan perdagangan internasional. Bidang ekonomi internasional seperti pertukaran jasa, komoditi, modal, teknologi informasi dan komunikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kota Pekanbaru terletak antara 101°14' - 101°34' Bujur Timur dan 0°25' - 0°45' Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5 - 50 meter. Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5 - 11 meter. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari ± 62,96 Km² menjadi ± 446,50 Km², terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan / 50 Desa. Dari hasil pengukuran / pematokan di lapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 Km². Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan Lainnya. Salah satu isu yang berkembang saat ini adalah komunitas ekonomi Asean.

Masyarakat ekonomi Asean adalah bentuk integrasi ekonomi ASEAN dalam artian adanya sistem perdagangan bebas antara Negara-negara ASEAN. Definisi integrasi ekonomi ASEAN secara umum adalah pencabutan atau penghapusan

¹ *Op cit.* Aleksius Jemadu. Hal 225

² Mohtar Mas'ood, 1990. *Ekonomi Politik Internasional*, Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada. Hlm 42.

hambatan-hambatan ekonomi (*economic frontier*) antara perekonomian Negara-negara ASEAN. Hambatan-hambatan ekonomi tersebut meliputi semua pembatasan yang menyebabkan mobilitas barang, jasa, faktor produksi, dan juga aliran komunikasi, secara aktual maupun potensial. ASEAN Community merupakan wujud dari kerjasama intra-ASEAN dalam Declaration of ASEAN Concord II di Bali, Oktober 2003. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) merupakan salah satu pilar dari perwujudan ASEAN Vision 2020, bersama-sama dengan *ASEAN Security Community* (ASC) dan *ASEAN Socio-Cultural Community* (ASCC).³ Suatu komunitas negara-negara ASEAN yang sangat luas, tidak ada batasan-batasan wilayah dalam bidang perekonomian. Dimana suatu negara dapat masuk bebas dalam persaingan pasar. Masyarakat ekonomi ASEAN yang bebas dari berbagai hambatan, peningkatan pengutamaan konektivitas, pemanfaatan berbagai skema kerja sama baik intra-ASEAN maupun antara ASEAN dengan negara mitra khususnya mitra FTA, serta penguatan peran pengusaha dalam proses integrasi internal ASEAN maupun dengan negara mitra.

Menurut Rizal dan Aida, bahwa pembentukan MEA dilakukan melalui empat kerangka strategis yaitu

pencapaian pasar tunggal dan kesatuan basis produksi, kawasan ekonomi yang berdaya saing, pertumbuhan ekonomi yang merata dan terintegrasi dengan perekonomian global. Langkah-langkah integrasi tersebut menjadi strategis mencapai daya saing yang tangguh dan disisi lain akan berkontribusi positif bagi masyarakat ASEAN secara keseluruhan maupun individual negara anggota.

Terkait dengan penerbitan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2014, dalam upaya untuk meningkatkan daya saing nasional dan kesiapan menghadapi pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang akan dimulai akhir 2015, maka presiden mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2014 tentang Peningkatan Daya Saing Dalam Rangka Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Melalui Inpres tersebut, Presiden meminta kepada para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, Sekretaris Kabinet, Jaksa Agung, Kapolri, para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), para Gubernur, dan para Bupati/Walikota di seluruh Indonesia, untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing secara terkoordinasi dan terintegrasi untuk melakukan peningkatan daya saing nasional dan melakukan persiapan pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN yang akan dimulai pada Tahun 2015.

³ Integrasi Ekonomi ASEAN 2015, <https://www.academia.edu/9503310/> (diakses tanggal 25 Juli 2015)

Oleh karena itu beberapa sektor ekonomi di Kota Pekanbaru mengalami perkembangan yang cukup signifikan terutama dalam sektor perdagangan dan perizinan jasa. Sedangkan untuk sektor pertanian dan pertambangan masih belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Sektor Pertanian Sektor pertanian merupakan sektor yang tidak potensial. Hal ini berarti sektor pertanian belum mampu melayani pasar di Kota Pekanbaru. Aspek letak geografis dan iklim cuaca diasumsikan menjadi faktor yang dapat menjelaskan kurangnya potensi sektor pertanian di Kota Pekanbaru. Selain itu, orientasi wilayah Kota Pekanbaru yang merupakan pusat pembangunan fisik karena terjadi peningkatan kegiatan penduduk di segala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya, akibatnya lahan masyarakat di sektor pertanian menjadi berkurang.

Selanjutnya, sektor Pertambangan dan Penggalian juga tidak potensial di Kota Pekanbaru karena kegiatan pada kedua sektor tersebut lebih banyak terdapat pada kota lain di Provinsi Riau. Secara fakta, Kota Pekanbaru lebih didominasi oleh kegiatan di sektor lain seperti perdagangan, yang artinya tidak adanya potensi bahan pertambangan dan galian di Kota Pekanbaru sehingga potensi pertumbuhan sektor ini relatif rendah

untuk skalabilitas Kota Pekanbaru. Kontribusi pertumbuhan sektor pertambangan dan galian justru berasal dari berbagai wilayah-wilayah tertentu di Provinsi Riau. Sektor Industri Pengolahan Selama kurun waktu 2008-2012, sektor industri pengolahan di Kota Pekanbaru bukanlah sektor yang memiliki keunggulan komparatif, artinya selama periode tersebut proses industrialisasi lebih terkonsentrasi di wilayah-wilayah kabupaten di Provinsi Riau.

Walaupun relatif ditemukan kegiatan industri pengolahan di Kota Pekanbaru relatif tidak signifikan pertumbuhannya secara komparatif dengan wilayah lain di Provinsi Riau sehingga kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Pekanbaru relatif rendah. Adapun sektor-sektor yang potensial dari data yang ada mulai tahun 2008 sampai 2012 adalah : a). Sektor Listrik, Gas & Air Bersih Dengan adanya pembangunan yang sangat cepat di Kota Pekanbaru akan memberikan dampak besar terhadap sektor listrik, gas, & air bersih karena sejalan dengan bertambahnya jumlah bangunan, penggunaan tenaga listrik setiap tahunnya mengalami peningkatan. Sehingga sektor ini bisa menjadi sektor yang menunjang perekonomian di Kota Pekanbaru. Selanjutnya, sektor Konstruksi Begitu juga dengan adanya peningkatan berbagai macam kegiatan dalam menunjang kehidupan masyarakat Kota Pekanbaru, maka membawa dampak besar terhadap

sektor konstruksi ini. Kota pekanbaru menjadi pusat belanja bagi masyarakat kota lainnya. Sehingga banyak bangunan-bangunan perbelanjaan yang dibangun dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat Kota Pekanbaru. Khusus sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran Kota Pekanbaru sebagai kota yang ramai pengunjung, menuntut Kota Pekanbaru menyediakan berbagai pelayanan yang maksimal. Sehingga menghasilkan pendapatan yang meningkat dari tahun ke tahun dan membuat Kota Pekanbaru tetap ramai dikunjungi oleh para pengunjung.

Sehingga, perlu pembenahan pembangunan untuk menarik investor datang ke Kota Pekanbaru. Salah satunya sektor perdagangan, hotel dan komunikasi. Sektor ini bisa dikatakan sektor yang sangat strategis bagi Kota Pekanbaru. Untuk itu pemerintah harus memperhatikan sektor ini supaya pertumbuhan ekonomi bisa meningkat dengan baik. Dan sektor Pengangkutan, komunikasi Perhatian tersebut tidak hanya terfokus pada satu aspek, tetapi harus secara menyeluruh agar sektor perdagangan, hotel dan komunikasi benar-benar bisa menjadi sektor utama dan dikembangkan dengan baik. Selain itu, semua pihak yang terkait dengan pengembangan sektor ini juga berperan aktif di dalamnya termasuk penduduk Kota Pekanbaru. Sektor Keuangan & Jasa Perusahaan Tingkat pertumbuhan penduduk menyebabkan meningkatnya tuntutan penyediaan tenaga kerja.

Penawaran tenaga kerja yang tinggi tanpa diimbangi dengan kesempatan kerja yang cukup akan menimbulkan pengangguran. Dengan adanya sektor Keuangan dan Jasa Perusahaan yang strategis untuk dikembangkan, maka tingkat pengangguran di Kota Pekanbaru dapat diminimalisir.

Ketahanan dan daya saing UMKM di Indonesia merupakan prioritas dalam pelaksanaan MEA 2015. Hal ini dikarenakan bahwa UMKM merupakan salah satu tulang punggung penanggulangan pengangguran dan kemiskinan sekaligus roda penggerak perekonomian negara. UMKM menopang sistem perekonomian sebuah daerah khususnya Kota Pekanbaru. Berdasarkan data terakhir dari Dinas Koperasi dan UMKM pada tahun 2013 terdapat 12.800 UMKM di Kota Pekanbaru.⁴ Sebagian besar produk yang dihasilkan oleh sektor UMKM menyentuh sebagian besar kebutuhan dasar masyarakat. Apabila kebutuhan masyarakat ini dipenuhi oleh UMKM dari negara luar, tentu akan banyak keuntungan yang mereka raih, sehingga Indonesia hanya menjadi penonton di negeri sendiri. Hal ini juga dikhawatirkan akan banyak UMKM yang gulung tikar. Pelatihan bagi UMKM dilatarbelakangi oleh beberapa hal salah satunya adalah ketidakmampuan produk lokal bersaing dengan produk luar, mengakibatkan produk-produk luar negeri masuk dengan cepat di

⁴ Pekanbaru dalam angka, Tahun 2014.

Kota Pekanbaru. Hal ini tentu mengancam keberlangsungan UMKM lokal. Untuk itu pemerintah harus mampu memberdayakan UMKM sekaligus harus mementingkan dan melindungi nasib UMKM ke depannya dalam menghadapi MEA 2015. Pelatihan dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas produk UMKM agar bisa memiliki kualitas yang berdaya saing tinggi. Melalui pelatihan tersebut, pelaku UMKM bisa mendapatkan informasi tentang pengelolaan UMKM yang baik. Oleh karena itu, beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dalam meningkatkan daya saing Usaha Ekonomi Mikro Kecil Menengah menghadapi masyarakat ekonomi Asean adalah:

1. Pemerintah Kota Pekanbaru melakukan Sosialisasi Masyarakat Ekonomi ASEAN kepada Pengusaha UMKM di Kota Pekanbaru

Setiap negara di Asean yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama, perlu menciptakan sebuah wadah atau badan dimana mereka saling berusaha untuk mewujudkan tujuan tersebut. Dan hal ini lah yang menjadi sebab adanya tujuan dari sebuah organisasi. Tujuan dicerminkan oleh sasaran yang harus dilakukan baik dalam jangka pendek, maupun jangka panjang. Adapun tujuan dari MEA adalah untuk meningkatkan stabilitas perekonomian di kawasan ASEAN, membentuk kawasan ekonomi antar negara ASEAN yang kuat. Bahwa saat

ini di Amerika dan Eropa masih mengalami krisis ekonomi.

Selain itu, pelaksanaan sosialisasi tentang persiapan dan tantangan dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 ini dilakukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat khususnya pelaku UMKM di Kota Pekanbaru untuk dapat mengetahui tantangan- tantangan apa saja yang akan dihadapi dalam MEA 2015 nanti, sehingga pelaku UMKM sudah dapat melakukan startegi dan persiapan secara baik dan maksimal. Hal ini dilakukan karena masih banyak pelaku UMKM yang belum mengetahui kegiatan MEA ini, seperti Winda yang merupakan salah seorang pengrajin tenun di jalan Kartama Kota Pekanbaru. Menurut Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, sosialisasi secara langsung masih terns dilakukan meski belum terlaksana dengan maksimal, dikarenakan persoalan Sumber Daya Manusia dan waktu, tetapi secara implisit pemerintah sudah menginformasikan mengenai tentang pelaksanaan MEA pada tahun 2015 ini, yakni melalui spanduk, baliho, dan media cetak lainnya. Walaupun memang diakui sampai dengan saat ini upaya tersebut belum memberikan hasil yang maksimal.

2. Mengadakan Pembinaan Kelembagaan terhadap UMKM Kota Pekanbaru

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh seluruh pengusaha UKM

di Indonesia termasuk di Kota Pekanbaru saat ini adalah minimnya pengetahuan dan kemampuan pengusaha dalam menjalankan roda organisasi koperasi sehingga hal ini mengakibatkan rapat anggota tahunan koperasi tidak dilaksanakan dan berdampak pada meningkatnya jumlah koperasi yang tidak aktif dan hal ini jugalah yang menjadi permasalahan koperasi dan UMKM di Kota Pekanbaru. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Pekanbaru telah mengadakan kegiatan pembinaan manajemen kelembagaan bertujuan untuk mengelola serta mengatur segala sesuatunya agar UMKM bisa berkembang dengan baik. Pembinaan manajemen kelembagaan ini penting untuk dilaksanakan, dengan harapan dapat memberi pengetahuan baik tentang mengatur keuangan UMKM maupun mengatur segala administrasi. Sehingga dengan adanya pembinaan manajemen suatu lembaga akan menjadi lebih cakap untuk mengurus dan mengatur organisasinya dengan baik.

Menurut Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru, pembinaan manajemen kelembagaan bertujuan untuk memberi pengetahuan kepada UMKM di Kota Pekanbaru. Hal ini dilakukan karena masih banyak UMKM yang memiliki pembukuan keuangan dengan sederhana dan administrasi yang tidak teratur. Sehingga pemerintah melalui Dinas Koperasi dan UMKM memberikan format pembukuan keuangan yang

benar sehingga pelaku UMKM bisa menghitung pengeluaran dan pemasukan dengan baik dan jelas. Hal ini tentunya akan memudahkan bagi pelaku UMKM untuk melakukan evaluasi terhadap usahanya. Pelaku UMKM di Kota Pekanbaru sangat antusias mengikuti program pembinaan manajemen kelembagaan yang dilakukan oleh pemerintah. Seperti yang dipaparkan oleh Rusma, salah satu pengrajin rotan di jalan Yos Sudarso KM. 1 Kota Pekanbaru dan Mursidah salah satu pengrajin tenun di Kota Pekanbaru. Melalui program ini mereka lebih mudah mengatur keuangan dan jadwal kerja karyawan dengan baik, tersistematis dan jelas. Berdasarkan pemaparan di atas, bisa disimpulkan bahwa kegiatan pembinaan manajemen kelembagaan sangat penting untuk dilaksanakan, tidak hanya sebagai persiapan untuk menghadapi MEA 2015 tetapi juga untuk peningkatan kinerja UMKM di Kota Pekanbaru.

Sehingga pelaku UMKM bisa membuat pembukuan yang baik dan benar serta mampu mengorganisir kegiatan atau usaha mereka secara teratur. Ketua RT sekaligus salah satu pengrajin rotan di Kota Pekanbaru, wawancara dilakukan pada tanggal 7 Agustus 2015 di Kota Pekanbaru. PEKANBARU - Walikota Pekanbaru H Firdaus, memastikan, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Pekanbaru secara umum sudah siap bersaing dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

yang berlaku awal tahun 2016 ini. Masyarakat Ekonomi ASEAN memiliki pola untuk mengintegrasikan ekonomi di kawasan ASEAN dengan cara membentuk sistem perdagangan bebas atau free trade antara sesama negara anggota ASEAN. Sebelum diberlakukan era MEA ini sudah menjadi perhatian kami, apalagi sekarang sudah diterapkan maka memang diperlukan pengembangan, agar kita tidak hanya jadi pembeli saja di pada MEA. Menurut Walikota Pekanbaru, Dr. H. Firdaus MT bahwa kedatangan produk-produk dari luar negeri ke Pekanbaru tidak akan mampu dibendung lagi oleh daerah. Bahkan masyarakat akan lebih memilih produk impor karena kualitasnya lebih baik dan harganya lebih murah. Apalagi selama ini, produk luar negeri sudah banyak membanjiri di Pasar Bawah Pekanbaru. Walau begitu, perlu dipikirkan bagaimana supaya UMKM yang berada di kota ini mampu menghasilkan produk-produk yang lebih berkualitas dengan harga relatif lebih murah, sehingga dapat bersaing dengan produk-produk dari luar negeri.

Berdasarkan data terakhir Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru saat ini, ada sekitar 12.000 unit UMKM yang bergerak di sektor perdagangan dan sektor jasa seperti usaha kerajinan tenun, rotan, songket, makanan kering dan kue. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Pekanbaru, Ingot Ahmad Hutasuht mengatakan,

pihaknya sudah melakukan berbagai upaya pembinaan agar pelaku UMKM bisa bersaing dengan kualitas produk yang juga menjadi pilihan bagi masyarakat di negara-negara ASEAN. Menurutnya, banyak yang harus dibenahi terhadap produk-produk yang dihasilkan UMKM di Pekanbaru seperti kemasan dan keahlian tenaga kerja.

3. Memberikan Konsultasi Bisnis kepada UMKM Kota Pekanbaru

Selain memberikan pembinaan rutin, maka Pemerintah Kota Pekanbaru juga membuka Konsultasi Bisnis Konsultasi bisnis dilakukan untuk memberikan konsultasi serta pengetahuan kepada pelaku UMKM baik itu pelaku usaha yang sudah lama berdiri maupun bagi pelaku usaha pemula, untuk mengetahui strategi dan persiapan yang dapat dilakukan dalam mengembangkan bisnis dan usahanya. Kegiatan konsultasi bisnis ini merupakan salah satu tuntutan dan aspirasi dari masyarakat, agar memudahkan bagi mereka untuk dapat memulai usaha maupun mengembangkan usahanya. Kegiatan ini dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru.

Sehingga masyarakat yang ingin berkonsultasi bisnis bisa langsung datang ke kantor Dinas Koperasi dan UMKM di jam kerja. Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru sudah menyediakan petugas khusus untuk membantu masyarakat yang ingin berkonsultasi bisnis dan hal

ini dilakukan dengan tidak dipungut biaya. Kegiatan ini juga dapat membantu masyarakat dan pelaku UMKM di Kotar. Pekanbaru untuk dapat memperoleh referensi terhadap usaha yang akan/sedang dilaksanakan ataupun untuk dapat mengoptimalkan usaha dalam menghadapi MEA 2015. Selain itu juga diharapkan bisa menumbuhkan minat masyarakat dan jiwa enterpreneurship di kalangan masyarakat sehingga akan memunculkan pengusaha- pengusaha baru pada UMKM di Kota Pekanbaru. Dengan minat masyarakat yang tinggi terhadap UMKM, maka secara langsung maupun tidak langsung akan bisa menekan angka pengangguran dengan terciptanya lapangan pekerjaan baru. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa lambat laun minat masyarakat terhadap profesi UMKM akan berkurang. Hal ini disebabkan pola kehidupan masyarakat yang selalu dimanjakan oleh alam, terlebih lagi nantinya UMKM lokal akan bersaing dengan komunitas ASEAN. Sehingga dengan konsultasi bisnis ini, pemerintah dapat membangkitkan jiwa enterpreneurship, khususnya bagi kalangan muda untuk dapat membuka lapangan kerja di Kota Pekanbaru.

Firdaus memastikan, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Pekanbaru, secara umum sudah siap bersaing dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang berlaku awal tahun 2016 ini. MEA memiliki pola untuk mengintegrasikan ekonomi di kawasan

ASEAN, dengan cara membentuk sistem perdagangan bebas atau free trade antara sesama negara anggota ASEAN. Jauh-jauh hari sebelumnya, era MEA ini sudah menjadi perhatian Pemerintah Kota Pekanbaru, apalagi sekarang sudah diterapkan maka memang diperlukan pengembangan, agar tidak hanya jadi pembeli saja di pada MEA nanti.

4. Pemerintah Kota Pekanbaru Memangkas Rantai Birokrasi Investasi

Dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat terutama terkait perizinan investasi di Kota Pekanbaru, maka Pemerintah Kota Pekanbaru membuat beberapa terobosan salah satunya kemudahan dalam mengurus izin usaha di Kota Pekanbaru dan salah satunya adalah membentuk Badan Perizinan Terpadu. Pembentukan unit pelayanan umum terpadu pada tahun 1999 sesuai Keputusan Walikota madya Kepala Daerah Tingkat II Pekanbaru nomor 135 tahun 1999 tanggal 28 September 1999 tentang organisasi dan tatalaksana Unit Pelayanan Umum Terpadu Kotamadya Daerah Tingkat II Kota Pekanbaru. Kantor Pelayanan Terpadu berdasarkan Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 30 tahun 2005 yang saat itu masih merupakan loket perwakilan SKPD yang merupakan pelayanan terpadu satu atap.

Sesuai Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 tahun 2008, dibentuklah Badan Pelayanan Terpadu

yang merupakan SKPD penyelenggara pelayanan Terpadu satu pintu yang efektif berjalan pada tanggal 5 Januari 2009. Sesuai Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 tahun 2008 tentang pembentukan susunan organisasi, kedudukan dan tugas pokok lembaga teknis daerah, maka pada Januari 2014 resmi menjadi Badan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Pekanbaru. pelayanan perizinan dengan sistem terpadu satu pintu (*one stop service*) membuat waktu pembuatan izin menjadi lebih singkat. Pasalnya, dengan pengurusan administrasi berbasis teknologi informasi, *input* data cukup dilakukan sekali, dan administrasi bisa dilakukan secara simultan. Dengan adanya kelembagaan pelayanan terpadu satu pintu, seluruh perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota dapat terlayani dalam satu lembaga.

Dengan dibentuknya Kantor/Dinas Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu ini sebagai institusi yang khusus bertugas memberikan pelayanan perizinan kepada masyarakat, dalam hal pengurusan perizinan masyarakat hanya cukup mendatangi satu kantor/dinas saja. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan

dalam satu tempat. Dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu, kepala PTSP diberi pelimpahan kewenangan untuk menandatangani izin yang masuk, hal ini berarti penyederhanaan pelayanan. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya penyingkatan terhadap waktu, prosedur, dan biaya pemberian perizinan dan non perizinan. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Pemberlakuan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) ini diharapkan mampu memangkas waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk mengurus perizinan. Hasilnya pelayanan perizinan lebih efektif, mudah dan murah. (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu).

5. Pemerintah Kota Pekanbaru Mengadakan Pengawasan terhadap UMKM Kota Pekanbaru

Koordinasi dan pengawasan merupakan kegiatan yang selalu ada dalam sebuah organisasi terutama koperasi, kedua konsep ini mempunyai peranan yang penting dalam memajukan sebuah organisasi, terlebih lagi adalah organisasi koperasi. Pengkoordinasian mutlak diperlukan dalam sebuah koperasi, karena dalam sebuah koperasi ada pembagian kerja yang amat substansi yaitu pekerjaan manajemen keaktifan koperasi untuk mencapai tujuan ekonomi kerakyatan

yang sesuai dengan mutu pembangunan masyarakat di sebuah daerah.

Sejak tahun 2011, Dinas Koperasi, UKM dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru telah melakukan kegiatan dalam bentuk koordinasi dalam pembinaan dan pengawasan terhadap perkembangan kegiatan usaha mikro dan kecil menengah di Kota Pekanbaru melalui beberapa bentuk kegiatan teknis seperti pengawasan terhadap kinerja rapat anggota tahunan koperasi dan perkembangan kegiatan usaha mikro dan kecil menengah di Kota Pekanbaru. Koordinasi sebagai wujud dari pelaksanaan pembinaan dan pengawasan secara periodik dan intensif selalu dilakukan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru untuk dapat meningkatkan peran koperasi secara optimal dan peningkatan jumlah koperasi dan UMKM untuk diaktifkan kembali. Sehingga dengan adanya pembinaan terhadap pengurus anggota dan manajer serta karyawan koperasi dan UMKM di Kota Pekanbaru maka hal ini diharapkan dapat memberikan kesadaran pentingnya koperasi kepada masyarakat di Kota Pekanbaru. Menurut Kepala Seksi Penyuluhan koperasi, Dinas Koperasi, UKM dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru, bahwa:

“Di dalam optimalisasi peran koperasi dan UMKM di Kota Pekanbaru ini maka unsur komunikasi ini tidak lepas dari

penguatan organisasi. Komunikasi dilakukan tidak hanya dengan pihak eksternal saja yaitu anggota akan tetapi penting untuk komunikasi dengan pihak internal yang meliputi Rapat Pengurus, Pengawas, Manajer, PPL, Karyawan”.

Berdasarkan wawancara diatas, maka dapat dikatakan bahwa manajemen Dinas Koperasi, UKM dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru ini menunjuk kepada proses, maka manajemen dapat diberi batasan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan proses penggunaan lain-lain sumber daya organisasi untuk tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Selain itu, setiap tahunnya Dinas Koperasi, UKM dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru juga rutin mengadakan kegiatan supervisi kepada koperasi-koperasi dan perkembangan kegiatan usaha mikro dan kecil menengah di Kota Pekanbaru Kegiatan supervisi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru adalah dengan melaksanakan pembimbingan teknis dan diskusi bersama pengurus terhadap masalah yang dihadapi sehingga dengan adanya diskusi dan bimbingan rutin yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Pemberdayaan

Masyarakat Kota Pekanbaru sehingga diharapkan mampu untuk meningkatkan keaktifan dan keragaan koperasi dan UMKM di Kota Pekanbaru.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dalam meningkatkan perkembangan kegiatan usaha mikro dan kecil menengah di Kota Pekanbaru menghadapi masyarakat ekonomi Asean adalah dengan melakukan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha kecil menengah dan memangkan mata rantai birokrasi perizinan di Kota Pekanbaru. Usaha kecil menengah merupakan salah satu bentuk ekonomi kerakyatan di Indonesia dan salah satu tantang besar yang dihadapi oleh usaha mikro kecil dan menengah di Kota Pekanbaru adalah perkembangan masyarakat ekonomi Asean yang artinya dalam perjalanannya usaha mikro kecil dan menengah tidak hanya akan menghadapi persaingan dan kompetisi antar sesama pengusaha lokal tetapi juga menghadapi persaingan dengan pengusaha lainnya di negara lain di kawasan Asia Tenggara.

Ketahanan dan daya saing UMKM di Indonesia merupakan prioritas dalam pelaksanaan MEA 2015. Hal ini dikarenakan bahwa UMKM merupakan salah satu tulang punggung penanggulangan pengangguran dan kemiskinan

sekaligus roda penggerak perekonomian negara. UMKM menopang sistem perekonomian sebuah daerah khususnya Kota Pekanbaru. Berdasarkan data terakhir dari Dinas Koperasi dan UMKM pada tahun 2013 terdapat 12.800 UMKM di Kota Pekanbaru.⁵ Sebagian besar produk yang dihasilkan oleh sektor UMKM menyentuh sebagian besar kebutuhan dasar masyarakat. Apabila kebutuhan masyarakat ini dipenuhi oleh UMKM dari negara luar, tentu akan banyak keuntungan yang mereka raih, sehingga Indonesia hanya menjadi penonton di negeri sendiri. Hal ini juga dikhawatirkan akan banyak UMKM yang gulung tikar. Pelatihan bagi UMKM dilatarbelakangi oleh beberapa hal salah satunya adalah ketidakmampuan produk lokal bersaing dengan produk luar, mengakibatkan produk-produk luar negeri masuk dengan cepat di Kota Pekanbaru. Hal ini tentu mengancam keberlangsungan UMKM lokal. Untuk itu pemerintah harus mampu memberdayakan UMKM sekaligus harus mementingkan dan melindungi nasib UMKM ke depannya dalam menghadapi MEA 2015. Pelatihan dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas produk UMKM agar bisa memiliki kualitas yang berdaya saing tinggi. Melalui pelatihan tersebut, pelaku UMKM bisa mendapatkan informasi tentang pengelolaan UMKM yang baik.

⁵ Pekanbaru dalam angka, Tahun 2014.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Fukuyama, Francis. 1992. *The End of History and The Last Man*. London.

Jemadu, Aleksius. 2007. *Politik Global dalam Teori dan Praktik*. Jakarta. Graha Ilmu.

Laporan Tahunan Badan Pusat Statistik. 2015. *Pekanbaru dalam Angka*. Provinsi Riau. Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru.

Maleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya.

Mas'oed, Mochtar, 1990. *Ekonomi Politik Internasional*, Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada.

Plano, Jack C. 1998. *Kamus Hubungan internasional*. Jakarta: Putra Abardin.

Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa. 1985. *Kamus Umum Bahasa Indonesia Cetakan VIII*. Jakarta: Balai Pustaka.

Sekretariat Nasional ASEAN. 2002. *ASEAN Selayang Pandang*. Jakarta. Departemen Luar Negeri Republik Indonesia.

Waters, M. 1995. *Globalization*. London : Routledge.

Webster's, Merriam. 1999. *Collegiate Dictionary, ed. 10*. Springfield, Massachusetts, USA : Merriam Webster, Inc.

Wiena Anorga, 1993. *Kamus Istilah Ekonomi*. Bandung; PT M2S.

Website

ASEAN Concord II/Bali Concord II, <http://www.aseansec.org/15159.htm>,

ASEAN Economic Community Blueprint, <http://www.aseansec.org/21083.pdf>,

ASEAN Vision 2020, <http://www.aseansec.org/1814.htm>